



Pengantar :
DR. Nomensen Steffan Mambraku



KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGGI

**Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum
Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah**

Willius Kogoya

KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGGI

**Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum
Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah**

Willius Kogoya

**Pengantar :
DR. Nomensen Steffan Mambraku**



KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF *NENGGI-KENGGI*

**Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum
dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah**

Penulis:

Willius Kogoya

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Atep Jejen

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-6457-84-9

Cetakan Pertama:

September, 2014

Hak Cipta 2014, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2014

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: admin@penerbitwidina.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan atas terbitnya buku referensi yang disusun merujuk pada hasil Penulisan karya Tesis pada S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada oleh Willius Kogoya yang berjudul **“Pro-Kontra Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Nenggi-Kenggi di Papua dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah”** pada Tahun 2008. Kemudian dituliskan Kembali sebagai buku pada Tahun 2014 dan dapat diterbitkan pada tahun 2021. Buku ini diberi judul **KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGGI (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah)**

Penulisan buku ini telah melibatkan banyak kontributor, baik pihak Pengelola S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, dosen Pembimbing dan Penguji, serta keluarga dan kerabat serta penerbit.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Direktur Program Pascasarjana selaku penanggung jawab program S2 Jurusan Antar Bidang Program Studi Ketahanan Nasional yang telah menerima, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan. Kepada Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ketahanan Nasional yang telah memberikan bekal ilmu, penulis ucapkan terima kasih. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada pengelola Program Studi Ketahanan Nasional, Bapak Drs. Armaidly Armawi, M.Si beserta staf administrasi yang memberi dorongan, petunjuk dan bimbingan.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Kodiran, MA selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si, selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan motivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan buku ini dari awal hingga akhir, para penguji lainnya semoga dalam tugas dan kehidupan bersama keluarga diberkati Tuhan.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Cenderawasih dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih, serta Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan

Ketua program Studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di UGM. Hal yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Yan Dirk Wabiser, S.Pd.,M.HUm selaku Penulis Konflik Pemekaran berdarah Timikia yang memberikan kontribusi data dan informasi.

Kepada pihak Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Universitas Cenderawasih dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua serta Dewan Perwakilan Daerah Papua yang telah memberikan izin penulisan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penulisan buku, penulis ucapkan terima kasih.

Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan program S2 di Ketahanan Nasional, kelompok senasib dan seperjuangan di Janturan bpk Kol Sri Wahjanto Budimulyono M.Si dan Mayor, Hartono, M.Si. Ucapan terima kasih juga kepada (Almarhum) Ev. Lelius Wanimbo, MA, Zakarias Kogoya, Etius Kogoya, Almarhum Dilius Wenda dan keluarga, Pemilik rumah sewa dan rekan se-kos di Yogyakarta Keluarga Daniel Wenda; ibu Sinta dan Eldy Wenda, Almarhum adik Yan H Bonsapia, Elpius Hugi, Kristian Tabuni, adik Fredy dan Teman Disen Wanimbo (Almarhum), Ayla beserta ayah dan bunda yang selalu bersama dalam suka dan duka, penulis ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Mama Wellena, Bapa (Almarhum) Bill Willem Kogoya, almarhumah Istri tercinta Neny Ary Muryati, Socratez Sofyan Yoman, Kakak Welmina, (Almarhum) Adik Budi, Arat, Helena, Almarhum bpk Andreas, Pares, Kilo, Almarhum Mandebet dan seluruh keluarga besar Kogoya, Wenda, Wanimbo, Yoman, Maggay, Yogoby, Takimay, Yikwa, Murib, Tabuni, Yanengga yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan baik secara moral maupun spirit kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih dalam konteks ini, kepada ketiga anak Albert, Winy dan Wila serta istri Sumiati dan yang tidak disebutkan yang turut memberi semangat dalam berkarya serta pihak penerbit Widina yang telah menerbitkan buku ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat yang berkelimpahan atas seluruh bantuan moril dan materil yang telah diberikan. Tulisan ini merupakan sumbangan pikiran dengan gaya bahasa yang unik; masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

September, 2021

Willius Kogoya

SAMBUTAN

Buku yang sangat fenomenal ini patut diapresiasi, karena hasil karya ilmiah ini dapat menyumbang secara khusus pada pengembangan ilmu pengetahuan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu. Konsep *Nenggi-Kenggi*, kebijakan pemekaran provinsi dan sejumlah kabupaten di tanah Papua pada era Otsus jilid I telah menyumbang plus minus yang menarik untuk disimak oleh pembaca baik mahasiswa, dosen dan birokrat atau LSM bidang ilmu sosial, Politik, Hukum dan PPKn, administrasi negara, Manajemen Konflik, dll.

Penulis berhasil menggambarkan apa yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1999-hingga 2004 meliputi; a) Belum adanya persamaan kehendak untuk memekarkan wilayah Provinsi dan Kabupaten. b) Kurang koordinasi antar pihak terkait. c) Belum melibatkan Majelis Rakyat Papua, DPRP, dan Eksekutif Daerah, serta pihak terkait lainnya dalam rencana pemekaran wilayah pada waktu itu. d) Niat dan tindakan nyata pemerintah pusat dan daerah, bersama Majelis Rakyat Papua, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun daerah pemekaran dengan pendekatan *good goverments* belum tampak, karena aturan pelaksanaan teknis di daerah dalam rangka implementasi Otonomi Khusus seperti Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten belum tuntas dibuat hingga Tahun 2008. Hal ini menjadi referensi bagi pemekaran yang sudah terjadi dan akan terjadi pada pasca Otonomi Khusus yang berakhir 2021.

Terima kasih kepada saudara Willius Kogoya yang memberikan kontribusi hasil karya ilmiah bagi pembangunan Pendidikan, politik dan pemerintahan di tanah Papua agar secara berkelanjutan para aktor pembangunan tidak mengabaikan nilai-nilai luhur *Nenggi-Nenggi* yang menjadi modal dasar pembangunan di tanah Papua.

September, 2021

Dekan FKIP UNCEN
DR. Nomensen Steffan Mambraku

PENGANTAR

Penulis menegaskan bahwa, Perbedaan Pendapat dan kepentingan boleh-boleh saja dalam rangka demokrasi dan kebebasan berekspresi, namun tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah adalah menjaga integrasi manusia Indonesia dalam rangka integrasi nasional dan memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kesejahteraan dengan keadilan agar dapat membangun masyarakat untuk kepentingan bersama dengan mengutamakan kesepakatan atau musyawarah yang sesuai nilai *Nenggi-Kenggi*.

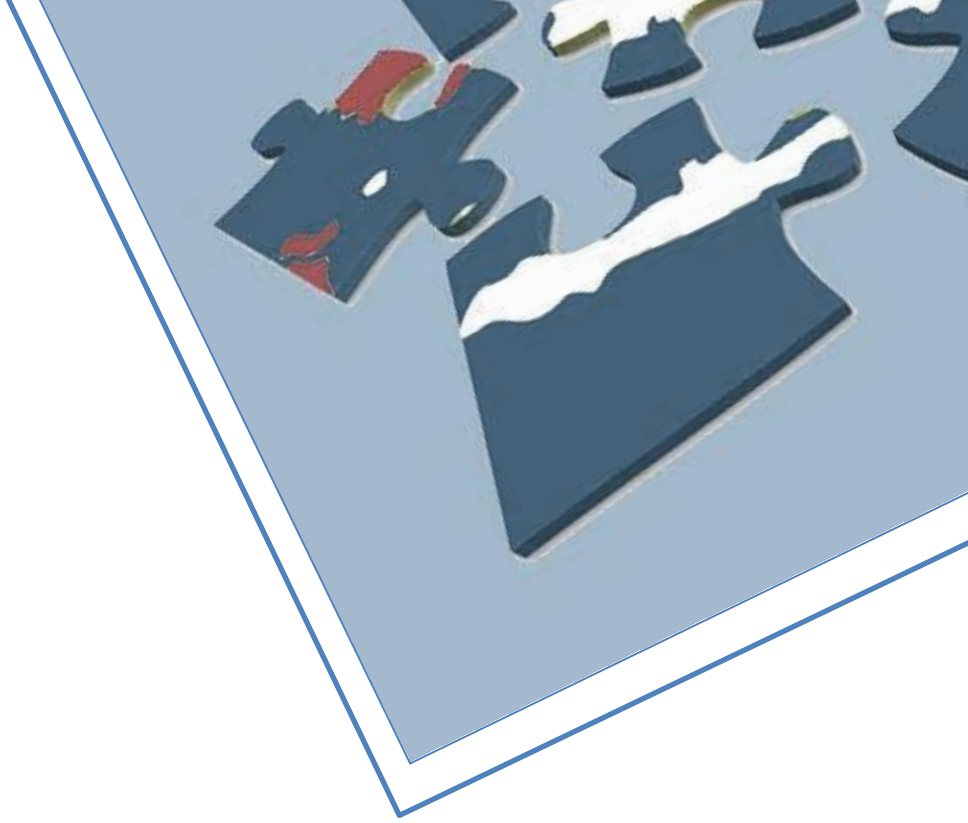
Pemekaran wilayah di Papua tahun 1999-2007 menunjukkan pemerintah telah menggunakan tangan besi sebagaimana dalam pemekaran provinsi Irian Jaya Barat dan berdasarkan bukti tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang fungsinya sebagai representasi seluruh komponen orang Papua untuk memberikan pertimbangan. Kebijakan pemerintah saling bertentangan satu sama lain dan terjadi korban di Timika dan beberapa daerah akibat konflik pemekaran provinsi dan kabupaten di Provinsi Papua dan bagi yang menikmati merasa nyaman-nyaman saja sebaliknya bagi yang tidak menikmati memberi dampak negatif dan Hal tersebut tidak dibenarkan dengan prinsip *Nenggi-Kenggi*, Pancasila dan prinsip Good Governance. Label teroris dan konflik vertikal dan horizontal terus berkepanjangan. Harapan bagi pembaca bahwa, yang salah dijadikan pelajaran untuk menata yang lebih baik untuk pembangunan tanah Papua berkelanjutan yang baik. *Selamat membaca.*

DR. Nomensen Steffan Mambraku
(Dekan FKIP Uncen Periode Tahun 2013-2017 dan Tahun 2017-2021)

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	iii
SAMBUTAN	vi
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 KONSEP NENGGI KENGGI DAN KONFLIK PEMEKARAN	
WILAYAH PROVINSI.....	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Nilai dan Konsep <i>Nenggi-Kenggi</i>	10
C. Konsep Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten di Papua.....	17
D. Beberapa Pendapat Ilmuwan Tentang Konflik	20
BAB 2 TEORI-TEORI	25
A. Pendahuluan.....	26
B. Teori Konflik Menurut Paradigma Sosiologi	27
C. Teori Pemetaan Konflik.....	29
D. Perspektif <i>Nenggi-Kenggi</i>	32
E. Teori Ketahanan Wilayah.....	33
BAB 3 PEMETAAN PRO-KONTRA PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI	
DAN KABUPATEN DI PAPUA TAHUN 1999-2004	35
A. Kronologi Upaya Pelaksanaan Pemekaran Wilayah di Papua	36
B. Sebab Akibat Pro-Kontra Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten	58
C. Analisis Pihak Pro-Kontra.....	68
BAB 4 MODEL NENGGI-KENGGI	91
A. Posisi <i>Nenggi-Kenggi</i> dalam Pandangan Sosiologi	92
B. <i>Nenggi-Kenggi</i> sebagai Nilai Budaya Orang Dani/Lani	98
C. <i>Nenggi-Kenggi</i> sebagai Model Alternatif Penyelesaian Masalah.....	102
D. Upaya Penyelesaian Pro-Kontra Pemekaran.....	130
E. Pentingnya <i>Nenggi-Kenggi</i> dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia	137

BAB 5 HUBUNGAN PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT KONFLIK PEMEKARAN	
WILAYAH DAN KETAHANAN WILAYAH DI PAPUA	149
A. Pendahuluan	150
B. Hubungan Positif Terhadap Ketahanan Wilayah	153
C. Hubungan Negatif Terhadap Ketahanan Wilayah	156
BAB 6 SARAN PANDANG	165
A. Rangkuman	166
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169
PROFIL PENULIS.....	174



KONFLIK PEMEKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA

BAB 1: KONSEP *NENGGI KENGGI*
DAN KONFLIK PEMEKARAN
WILAYAH PROVINSI

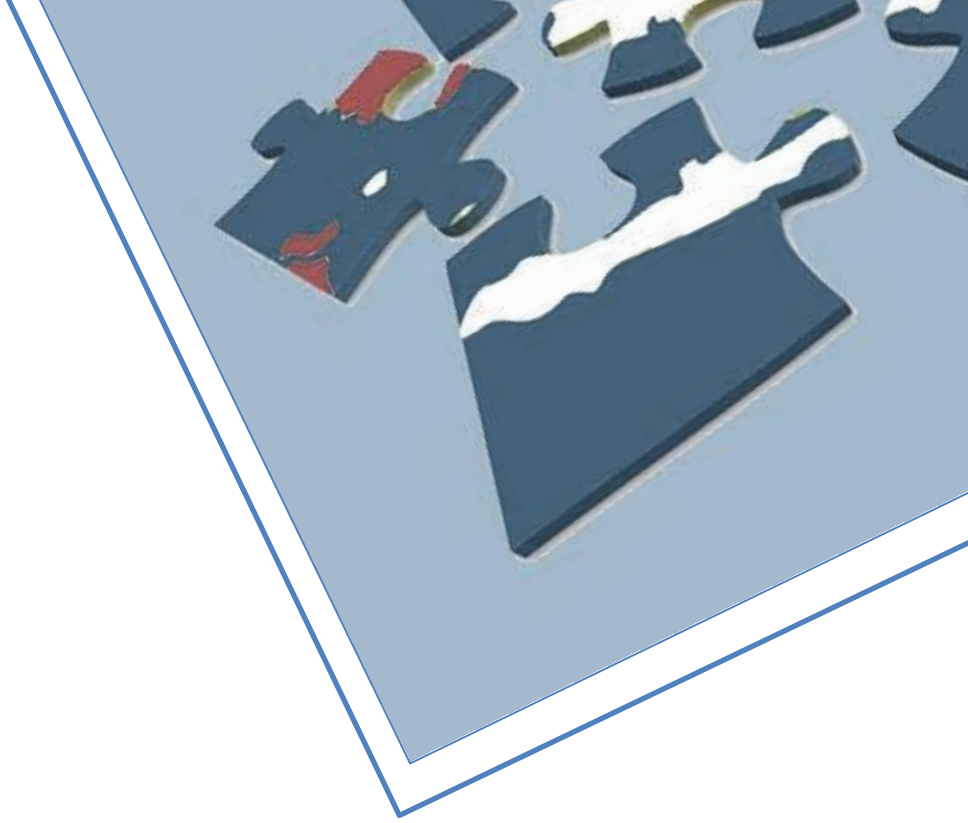
Willius Kogoya

BAB 1

KONSEP *NENGGI KENGGI* DAN KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 memuat kehendak politik bersama atau *political will* seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia; yang ditetapkan sebagai undang-undang dasar republik Indonesia dengan mekanisme dan proses demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya hukum tertinggi di Indonesia, pada Bab VI yang mengatur tentang pemerintahan daerah pada Pasal 18, 18A dan 18B menunjukkan adanya jaminan hukum dan pedoman kebijakan negara dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan pendekatan pembagian kekuasaan melalui kebijakan pemekaran wilayah provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Pasal 18, 18A dan 18B ditindaklanjuti dalam kebijakan yang bersifat teknis yang secara khusus mengatur tentang pemekaran wilayah dan otonomi khusus, sebagai contoh kebijakan untuk Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. (Restu Agung, 2004).



KONFLIK PEMEKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA

BAB 2: TEORI-TEORI

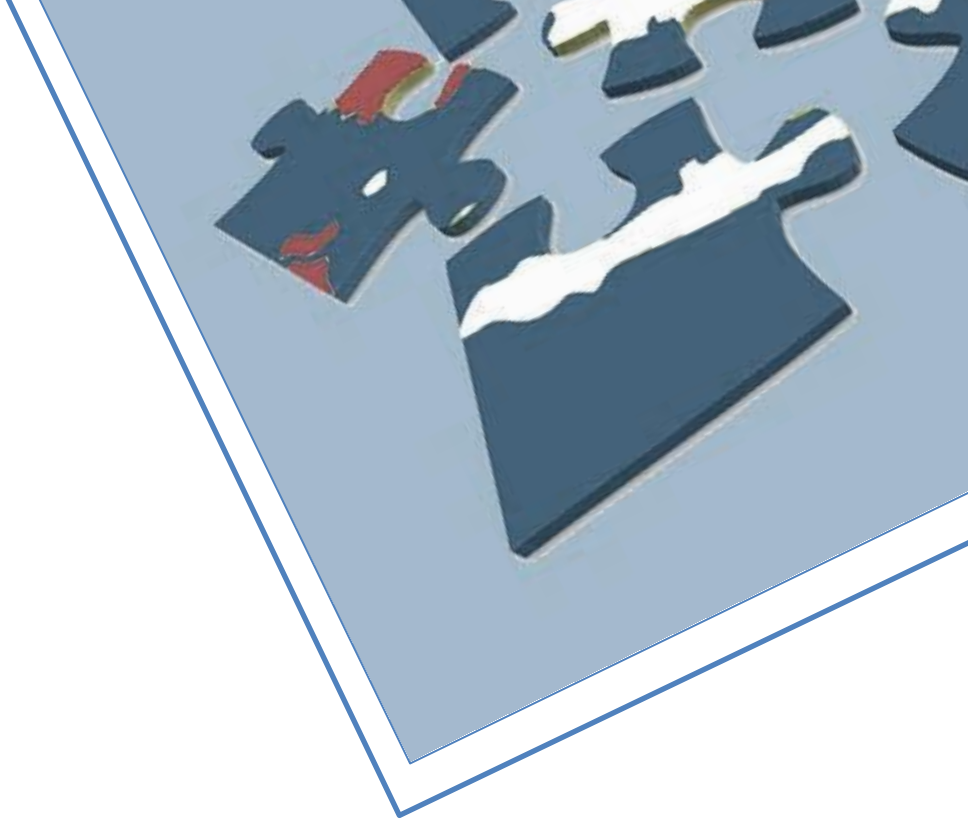
Willius Kogoya

BAB 2

TEORI-TEORI

A. PENDAHULUAN

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelaahan pada konflik ini, yaitu; 1) teori konflik menurut pandangan Sosiologis (a) Hardjana (1994), (b) Soekanto dan Yudo (1986), serta Lederach dalam Gustaf (2003); saling mendukung untuk melihat suatu fenomena atau peristiwa konflik seperti Pro-Kontra terhadap kebijakan Pemekaran di Papua. Dalam teori konflik disebutkan, bahwa konflik terjadi karena adanya faktor kepentingan dan tujuan yang berbeda yang hendak dicapai oleh masing-masing pihak. Perbedaan pendapat juga terjadi akibat faktor perbedaan latar belakang manusia sebagai pribadi yang unik dan berbeda-beda dalam mengungkapkan perasaan dan pendiriannya, serta dapat juga sebagai akibat kordinasi struktural dan komunikasi politik yang berbeda pada level pemerintahan. Dalam mengkaji suatu konflik ada metode pemetaan konflik, misalnya seperti pendapat Lederach, disebutkan *People, Proses, dan Problem*. Mempelajari konflik bermanfaat untuk belajar kelebihan dan kekurangan demi kelangsungan hidup generasi penerus. Peristiwa Pro-Kontra tersebut di atas dianalisis dengan teori Perspektif *Nenggi-Kenggi* menurut penulis dengan asumsi, bahwa Ketahanan Wilayah yang meliputi; Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan sebagai suatu sistem dapat dipengaruhi oleh kelebihan dan



KONFLIK PEMEKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA

BAB 3: PEMETAAN PRO-KONTRA
PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI DAN
KABUPATEN DI PAPUA TAHUN 1999-2004

Willius Kogoya

BAB 3

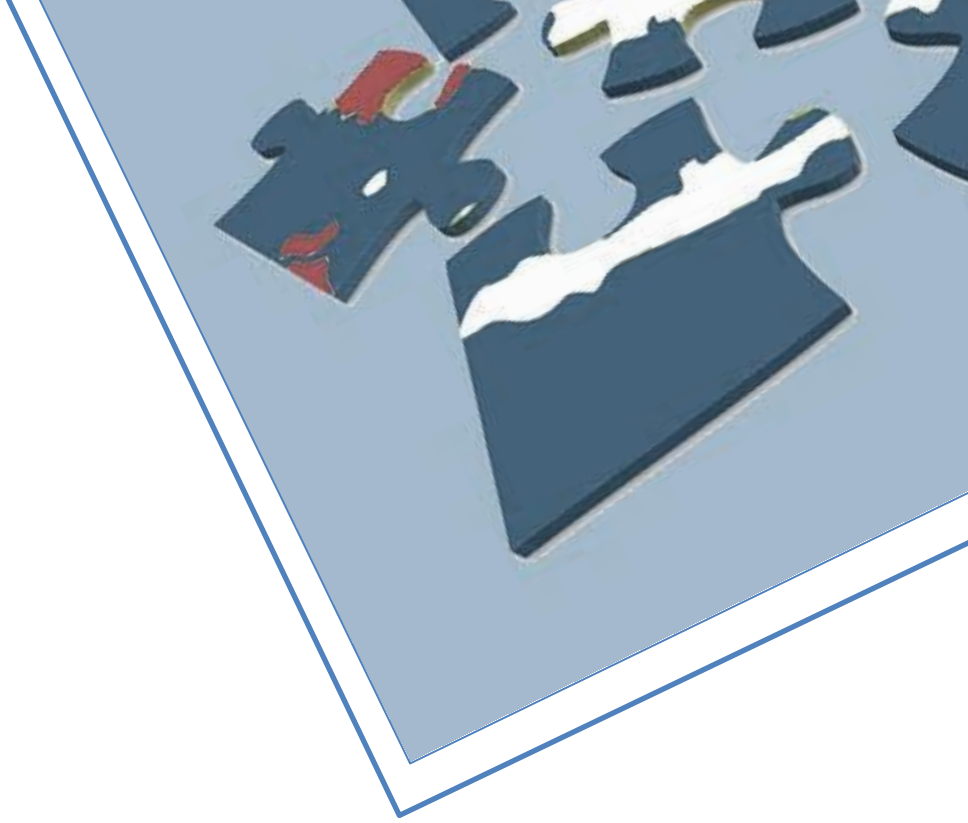
PEMETAAN PRO-KONTRA PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA TAHUN 1999-2004

Pro-kontra terjadi akibat adanya tuntutan merdeka keluar dari NKRI serta adanya dualisme kebijakan yang mengatur tentang pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota menurut UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 terutama pasal 76. Pemetaan pro-kontra menjelaskan secara garis besar tentang peristiwa, pihak yang terlibat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, antara lain;

A. KRONOLOGI UPAYA PELAKSANAAN PEMEKARAN WILAYAH DI PAPUA

1. *Pemekaran Wilayah Sebelum Reformasi*

Era tahun 70-an usulan (Pro) Pemekaran oleh gubernur Acub Zainal (pemerintah daerah Irian Jaya) tidak terealisasi dengan adanya kontra pemekaran dengan alasan kurang dana, dan kondisi politik pada masa itu yang tidak memungkinkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak terlaksana keinginan pemekaran wilayah pemerintahan pada saat itu. Pemekaran Provinsi



KONFLIK PEMEKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA

BAB 4: MODEL *NENGGI-KENGGI*

Willius Kogoya

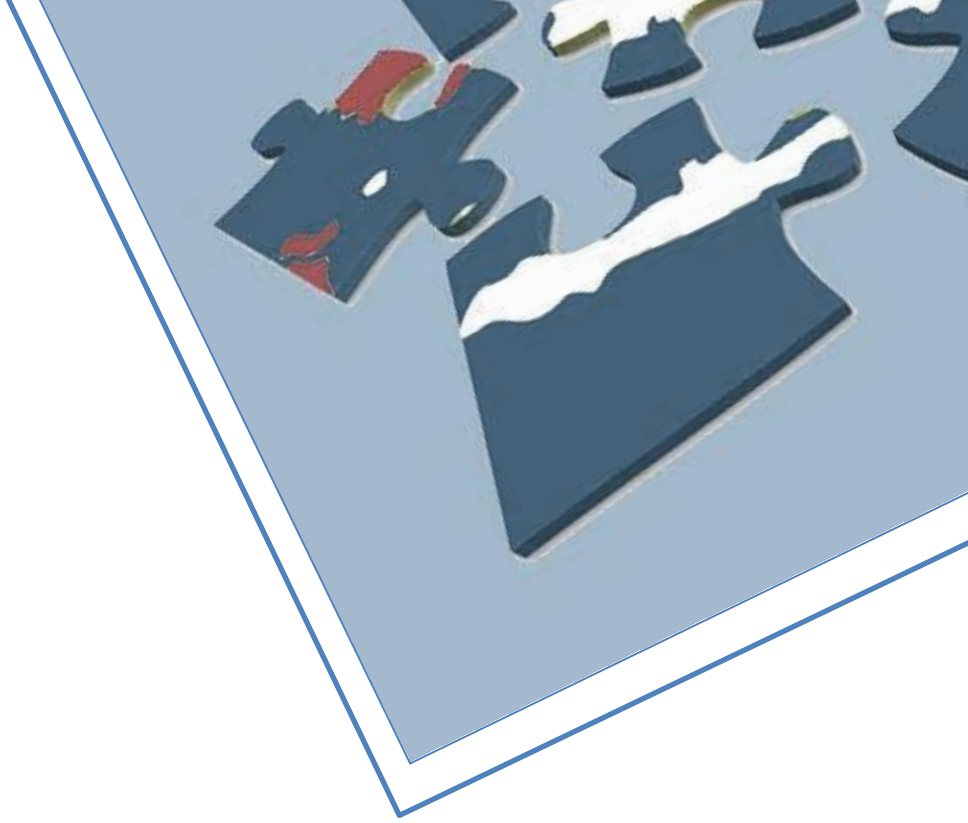
BAB 4

MODEL NENGGI-KENGGI

A. POSISI NENGGI-KENGGI DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI

Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang masyarakat ataupun kehidupan sosial. Semua ilmu sosial mempelajari tentang pola tingkah laku yang lazim ada pada kelompok-kelompok manusia, guna membedahkannya diperlukan pengertian yang tegas tentang sosiologi. Sosiologi berasal dari kata *socius*, artinya kawan ataupun masyarakat. Sedangkan logos, artinya ilmu pengetahuan/pikiran. Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sumbangan nyata sosiologi bagi ilmu sosial adalah dapat dengan jelas menganalisis interelasi dan interaksi sosial.

Dalam ilmu Sosiologi, nilai mengandung pengertian yang lebih luas. Menurut Frankena dalam Kaelan (1995:53), Nilai atau “*value*” (bahasa Inggris) termasuk dalam pengertian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari sebagai salah satu cabang filsafat, yaitu Filsafat Nilai (*Axiology, Theory of value*). Filsafat juga sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Selanjutnya Kaelan mengatakan bahwa, nilai berarti menimbang,



KONFLIK PEMEKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA

BAB 5: HUBUNGAN PERUBAHAN SOSIAL
AKIBAT KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH
DAN KETAHANAN WILAYAH DI PAPUA

Willius Kogoya

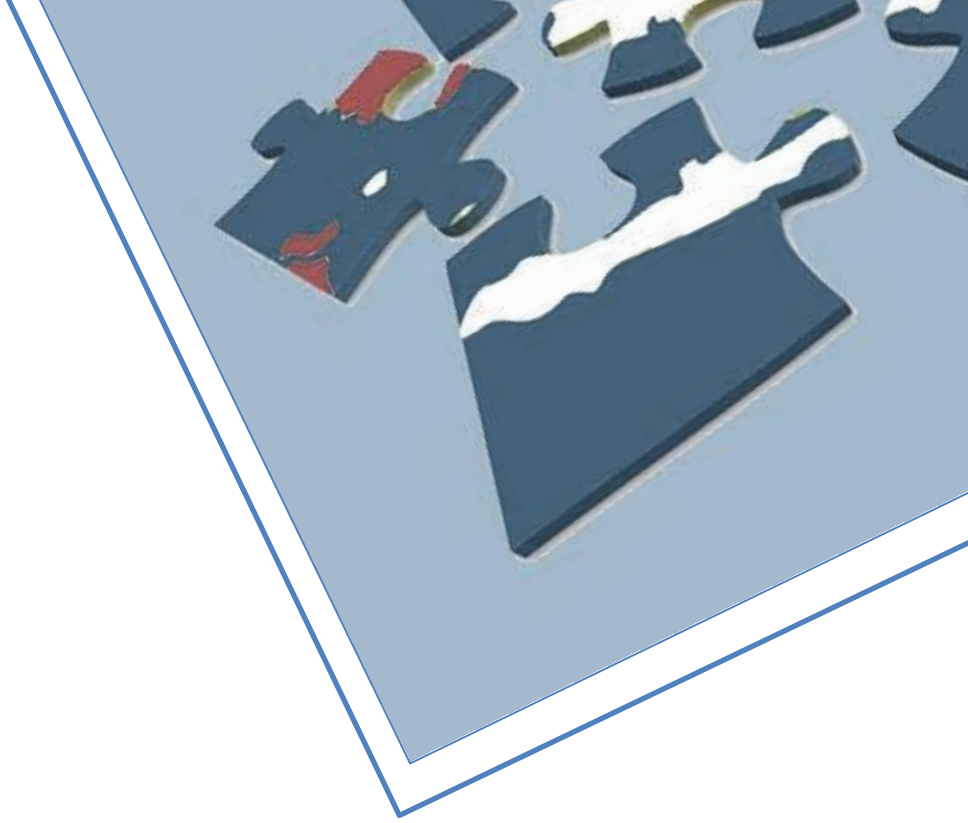
BAB 5

HUBUNGAN PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH DAN KETAHANAN WILAYAH DI PAPUA

A. PENDAHULUAN

Masyarakat di Papua kini sangat membutuhkan dan mengharapkan agar konflik sosial masyarakat atas sistem pemerintahan daerah ini perlu secara cepat diselesaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait di daerah yang dipercaya masyarakat dengan tetap memperhatikan upaya-upaya komprehensif, *integrated*, holistik dan damai guna mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Kata lain dari Konflik adalah pro-kontra atau setuju tidak setuju terhadap suatu objek tertentu, karena adanya faktor kepentingan dan latar belakang individu yang berbeda satu sama lain dengan cara menyampaikan pendapat atau cara mengekspresikan sesuatu yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Inti dari setiap beda pendapat, pro-kontra atau konflik yang terjadi dalam lingkungan keluarga sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perbedaan kepentingan. Sebagai contoh dalam konteks orang Papua, yang satu mau mencari keuntungan sebesar mungkin tanpa memperhitungkan hak orang lain; yang lain mau supaya gaji yang wajar dapat



KONFLIK PEMEKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA

BAB 6: SARAN PANDANG

Willius Kogoya

BAB 6

SARAN PANDANG

A. RANGKUMAN

1. Pro-Kontra terhadap kebijakan pemekaran provinsi dan kabupaten pasca pemberlakuan UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 dan Inpres No. 1 Tahun 2003, karena adanya faktor kebijakan pemerintah yang bersifat memaksa terjadinya perubahan sosial pada aspek ekonomi, sosial budaya dari tidak sejahtera menuju sejahtera dalam mengisi pemekaran wilayah dengan kebijakan otonomi khusus. Penyebab pro-kontra lainnya adalah penafsiran yang berbeda antara kebijakan satu dengan lainnya yang menimbulkan beda pendapat ketika terjadinya pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Tengah dengan beberapa kabupaten. Penggunaan kekerasan terjadi juga pada klimaksnya di Timika Tahun 2003 dan 2004.
2. *Nenggi-Kenggi* sebagai kearifan lokal orang Lani di pedalaman Papua merupakan ajaran moral yang dijadikan landasan berpikir dan bertindak oleh penganutnya. Ajaran moral ini dapat digunakan dalam menanggulangi konflik horizontal dan vertikal. Menilai dalam perspektif *Nenggi-Kenggi* terhadap pihak pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dengan melibatkan masyarakat dalam kasus pro-kontra pemekaran di Papua pasca pemberlakuan kebijakan pemekaran dengan UU No. 45 Tahun 1999 dengan UU No. 21 Tahun 2001 pada oknum jajaran elite politik dan birokrat kurang

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- , 2005, *Pengembangan Provinsi Papua (Suatu Tinjauan Historis)-* Makalah, disampaikan pada Seminar Pengembangan Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Papua bekerja sama dengan Tim Demokratik Cenderawasih, Jayapura. Hotel Relat
- , 2006. *Buku Surat Pemekaran Provinsi* (Kumpulan Kliping tentang Pemekaran Provinsi Papua-Cenderawasih *Pos, Papua Post, Suara Perempuan, Swara Nurani Papua*, sepanjang tahun 2003) Koleksi Pribadi pada Lembaga Kajian Sejarah Lokal Papua.
- , 2007. *Pemusnahan Etnis Melanesia (Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat*. Penerbit Galang Press Yogyakarta.
- Adriana Elisabet, dkk, 2004, *Peranan dan Kepentingan Aktor dalam Persoalan Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Andrianto Tuhana Taufiq, 2001. *Mengapa Papua Bergolak?*, Gama Global Media Yogyakarta.
- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Budiyanto, 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA kelas X*, Penerbit Erlangga.
- Cosser Lewis A, 1964, *The Functions of Social Conflic*, New York. A Divisions of Publishing Co.Inc
- Dahrendorf, Ralf. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri : Sebuah Analisa – Kritik*, penerj. Ali Mandan, CV Rajawali, Jakarta.
- Hadi, S, Widjajanto A, dkk, 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan dinamika*: Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hardjana, Agus M. (1994). *Konflik di Tempat Kerja*, Kanisius, Yogyakarta.

- Hartono A, 2008. *Pengelolaan Pelabuhan dan Ketahanan Ekonomi* (Kasus Sengketa Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) Antara PT Pelindo III dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Jawa Timur). Universitas Gadjah Mada.
- Hiskia Charles, M.S. 2005, *Implementasi Peraturan No. 129 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Wilayah: Studi Pembentukan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua*. Universitas Gadjah Mada (Tesis S2 Administrasi Negara).
- Hosio Jusach Eddy, 2005. *Nilai Politis Provinsi Irian Jaya bagi NKRI; Implementasi Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. LaksBang Yogyakarta.
- Itlay Simon, dkk, 1994. *Kebudayaan Jayawijaya Dalam Pembangunan bangsa*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Johnson Paul Doyle, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia
- Kaelan, M.S. (1996), *Filsafat Pancasila*, Penerbit "Paradigma" Jalan Bromo C 97 Negotirto, Yogyakarta.
- Karoba Sem, 2004. *Papua Menggugat Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat! Bagian Satu: Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat*.
- Kawer Gustaf, 2003. *Laporan Training Managemen Konflik Berbasis Komunitas Region Sulawesi, Maluku dan Papua*.
- Koentjaraningrat, 1993, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta. PT.Gramedia
- Kogoya Willius, 2003. *Pergeseran Nilai Gotong Royong Pada Masyarakat Suku Lani di Desa Kemiri Kecamatan Makki Kabupaten Jayawijaya*, (penelitian mandiri-Perpustakaan UNCEN)
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik : komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Penerbit LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.

- Maryati Kun dan Juju Suryawati, *Sosiologi 1 (Untuk SMA dan MA Kelas X)*, Esis-Erlangga (2007).
- Moeloeng. L.J., 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Munandar Soelaeman, 2000, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Restu Agung, 2004. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen MPR tentang Perubahan Pertama sampai dengan Keempat UUD 19945).
- Santoso Purwo, dkk, 2006. *Perjuangan Menuju Puncak Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak Pemekaran Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua*. PLOD UGM dengan Pemda Puncak Jaya.
- Setia T. Hadi, 2007, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua*, Harvindo.
- Soekanto Soejono dan Winarno Yudo, 1986, *George Simmel. Beberapa Teori Sosiologis*, Jakarta. Radjawali
- Soekanto, Soeryono. (1995). *Sosiologi : Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 1996. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Depdikbud. Jakarta.
- Suhady Idup dan Sinaga, AM, 2003, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Edisi Revisi I Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Sumijati dan Suhartono dkk, 2002. *Integrasi Moral Bangsa dan Perubahan*. Divisi Penerbitan Unit Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Ilmu Budaya UGM bekerja sama dengan Sinergi Press.
- Wabiser, Jan Dirk, 2003, *Konflik Pemekaran Provinsi Papua*, Laporan Penelitian Mandiri, Jayapura. Lemlit Uncen/FKIP Uncen

- Warikar, Lechana, 2005. *Konflik Politik dalam Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Mimika : Studi Kasus Pemekaran Wilayah Papua Tengah*. Universitas Gadjah Mada (Tesis S2 Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik)
- Wreksosuhardjo, 2004. *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Wriggins, Howard *Integrasi Bangsa dalam* Yahya Muhaimin dan Colin Andrews Mac 1981 (ed). *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Gadjah mada university Press.
- Yoman, Socratez. S. 2002. *Pepera 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis*. Lembaga Rekonsiliasi hak-Hak Asasi Masyarakat Kotek Papua Barat, 2002. Lerhamkot Papua Barat.

Sumber Dokumen:

- , Papua Aktual 2004 (April-Juni) Sekilas Informasi Seri Socio-Political Notes No. 8.
- Alua Agus, 2006. *Pandangan Majelis Rakyat Papua Tantang Implementasi Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001; Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua* (dokument)
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang NO. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong*,
- Mabruri Ghufon, 2007. *Merubah Pendekatan Keamanan Atas Papua*, Foker LSM Papua. (dapat dilihat juga dalam versi elektronik di <http://www.fokerlsmpapua.org>).

Pemerintah Provinsi Papua, 2007. *Laporan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua 2002 – 2005*. (materi Laporan Pemerintah pada waktu Evaluasi Otsus pada bulan November 2007).

Sekretariat Keadilan & Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura, 2003. *Membangun Budaya Damai & Rekonsiliasi Dasar Menangani Konflik Di Papua Refleksi November 2003*. (versi elektronik)

Sumule Agus, 2002, *Satu Setengah Tahun Otsus Papua Refleksi dan Prospek, Manokwari. (Versi Elektronik) Suara Pembaruan*.

Tim JIP Fisipol UGM, 2007. *Paradox of Plenty*. (Materi Diskusi)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 *Tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong*.

Sumber Media Massa Versi Cetak dan Elektronik (Internet):

Erari Phil, 2003. *Tantangan Bagi Presiden Yudhoyono Meredam Bom Waktu Inpres No 1 Tahun 2003 di Papua dalam Artikel (Versi Elektronik) Suara Pembaruan* di ambil pada tanggal, 11 November 2004.

<http://www.media-indonesia.com>, di update tanggal, 9 Juli 2007

Pikiran Rakyat (versi elektronik) Kamis, 28 Agustus 2003

PLOD UGM, 2007, *Materi diskusi* (versi elektronik) Divisi Riset dan Publikasi Program Pascasarjana (S2)

Tifa Irian, Minggu Pertama, Mei 1999

www.wikipedia.com, di update tanggal, 9 Juli 2007.

PROFIL PENULIS



Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc., lahir di Makki, 09 Juli 1978. Pernah SD di Tiom, pindah di Makki (Kab Jayawijaya - sekarang kab. Lanny Jaya), pindah lagi di SD Vim 2 Kotaraja Kota Jayapura dan pindah lagi di SD Inpres Mulele Wamena dan pindah ke Makki dan menyelesaikan SD Inpres Makki dan melanjutkan SMP Negeri Makki, semester 2 kelas 1

pindah ke SMP Negeri 2 Wamena dan tamat 1995. Usai tamat melanjutkan studi ke Jayapura sekolah di SMA Negeri 3 Sentani lulus Tahun 1998. Lulus S1 PPKn Universitas Cenderawasih 2003. Mengikuti Ujian seleksi dosen di UNCEN tahun 2003 dan menjadi CPNS sejak 1 Desember 2003. Tahun 2005-2008 Kuliah S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gajah Mada. Kembali ke UNCEN dan menjabat Ketua Program Studi S1 PPKn Tahun 2009-2013, Sekretaris Jurusan P.IPS Tahun 2013-2017 dan 2017-2021. Aktif sebagai Asesor, Instruktur dan anggota di BAN S/M Provinsi Papua sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Instruktur PLPG, PPG, pernah menjadi Instruktur Polisi Mengajar. Sejak 2003-2020 aktif menjadi staf ahli dan Pengurus Harian sebagai Sekretaris 2, Sekretaris 1 dan Sekretaris Umum dan Sekretaris Jenderal Gereja BPP-PGBP Tahun 2013-2020. Pernah mengabdikan atas permintaan Umat menjadi Wakil Gembala Sidang di Jemaat Baptis Menehi Sentani 2013-2020. Aktif mengajar Mata Kuliah PPKn, Pancasila, Kriminologi, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Teori dan Hukum Konstitusi, dll. Juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian dan karya penelitian sudah publikasi pada Jurnal Nasional pada Kajian Lemhanas RI tahun 2021 dan karya lainnya pada Penerbit Widina. Hasil Karya buku yang disadur dari Tesis S2 Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada, buku Ajar Mata Kuliah PPKn dan Pancasila, Buku Bunga Rampai diterbitkan oleh Penerbit Widina. Kini aktif di organisasi KAGAMA dan AP3Knl serta Perkumpulan Alumni PMK UNCEN juga Perkumpulan Angkatan PPKn 98 dan Perkumpulan Alumni 98 SMA 1 Sentani. Belum menyelesaikan ijin Belajar pada Program Doktor Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga-Jawa Tengah.

KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGGI

**Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum
Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah**

Kajian Pemekaran dan Konflik di Tanah Papua sejak 1999-2004 telah menjadi sejarah plus dan minus mengenai wajah gaya kepemimpinan, wajah tertib hukum dan administrasi pemerintahan secara formal oleh pemerintah Republik Indonesia di tanah Papua. Kondisi wajah negara dalam plus minus tentu berdampak pada ketahanan wilayah dan ketahanan nasional. Apa kata warga negara korban konflik? Karakter apa yang dipelajari oleh warga negara muda yang sedang belajar? Apakah metode tangan besi adalah metode yang dianggap terbaik bagi masyarakat Indonesia di Papua? *Nenggi-Kenggi* sebagai pisau analisis dan *problem solving* dan modal dasar pembangunan digunakan penulis untuk menegaskan bahwa, prinsip *Nenggi-Kenggi* yang melibatkan dua tangan dalam melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan persoalan secara bersama. Dalam konteks Pemekaran wilayah di Papua dan persoalan konflik horizontal dan vertikal lainnya sebaiknya pemerintah tidak menggunakan tangan besi sebagaimana dalam pemekaran provinsi Irian Jaya Barat telah menggunakan tangan besi dengan tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang fungsinya sebagai representasi seluruh komponen orang Papua untuk memberikan pertimbangan dan keinginan memerdekakan rakyat Papua dalam bingkai NKRI. Hasil Kajian menunjukkan, bahwa kebijakan pemerintah saling bertentangan satu sama lain serta menggunakan tangan besi, sehingga sudah bertentangan dengan prinsip *Nenggi-Kenggi*, Pancasila dan prinsip *Good Governance*. (Willius Kogoya)

Apresiasi kepada saudara Willius Kogoya yang berani memberikan kontribusi hasil karya ilmiah bagi pembangunan Pendidikan, politik, historis, hukum dan Administrasi negara dan pemerintahan di tanah Papua, agar secara berkelanjutan para aktor pembangun di Papua tidak mengabaikan nilai-nilai luhur *Nenggi-Nenggi* yang menjadi modal dasar pembangunan bangsa dimana secara sosiologis-PPKn untuk mengedukasi warga negara muda di tanah Papua dengan menjadikan aturan normatif sebagai panglima dalam menata kehidupan bernegara di negara hukum Republik Indonesia dan kebijakan politik yang tidak menimbulkan konflik berkepanjangan apalagi nyawa harus hilang akibat konflik kebijakan. (DR. Nomensen Steffan Mambraku-Dekan FKIP UNCEN).

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-6457-84-9



9 786236 457849